



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK TOMINI

INDIKASI PROGRAM UTAMA PEMANFAATAN RUANG LAUT

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
I. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT									
A. Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan									

1. Penataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V	
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040	
1. Penataan sebaran, hierarki, dan peran Pelabuhan Perikanan										
1.1. Penumbuhan ekonomi jejaring	1. Pelabuhan Perikanan Tenda di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo; 2. Pelabuhan Perikanan Tilamuta di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo; 3. Pelabuhan Perikanan Paranggi, di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Pemerintah Daerah (Pemda)						

4. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021- 2024)	II (2025- 2029)	III (2030- 2034)	IV (2035- 2039)	V 2040
	4. Pelabuhan Perikanan Inengo di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo; dan 5. Pelabuhan Perikanan Pagimana di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.	ketentuan peraturan perundang-undangan (sumber lain yang sah)							

2. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021- 2024)	II (2025- 2029)	III (2030- 2034)	IV (2035- 2039)	V 2040	
2. Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan										
2.1. Pengembangan Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya	1. Kabupaten Bone Bolango; 2. Kabupaten Tojo Una-Una; 3. Kabupaten Pohuwato; 4. Kota Gorontalo; dan 5. Kabupaten Parigi Moutong.	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kemen PUPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemda						

2.2. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
2.2. Pengembangan Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman	Kabupaten Pahuwato	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, dan Pemda					
3. Pengembangan dan/atau Peningkatan Fungsi Pusat Industri Kelautan									
3.1. Pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan	Kabupaten Boalemo	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Badan Riset dan Inovasi					

Nasional . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021- 2024)	II (2025- 2029)	III (2030- 2034)	IV (2035- 2039)	V 2040
				Nasional, dan Pemda					
B. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut									
1. Peningkatan Status Pelabuhan Laut	1. Pelabuhan Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah; 2. Pelabuhan Basabungan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan (Kemenuh) atau Pemda	KKP dan Kemen PUPR					

3. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	3. Pelabuhan Bualemo di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; 4. Pelabuhan Bunta di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; 5. Pelabuhan Dolong dalam satu sistem dengan pelabuhan penyeberangan Dolong di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah;								

6. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	6. Pelabuhan Kabalutan di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah; 7. Pelabuhan Kalia di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah; 8. Pelabuhan Katupat di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah; 9. Pelabuhan Kuling Kinan di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah;								

10. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	10. Pelabuhan Labuan di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah; 11. Pelabuhan Lebiti di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah; 12. Pelabuhan Malenge di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah; 13. Pelabuhan Mantangisi di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah;								

14. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	14. Pelabuhan Moutong di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah; 15. Pelabuhan Pagimana dalam satu sistem dengan pelabuhan penyeberangan Pagimana di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; 16. Pelabuhan Parigi di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;								

17. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	17. Pelabuhan Pasokan dalam satu sistem dengan pelabuhan penyeberangan Pasokan di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah; 18. Pelabuhan Podi di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah; 19. Pelabuhan Popolii di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah;								

20. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	20. Pelabuhan Poso dalam satu sistem dengan pelabuhan penyeberangan Poso di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah; 21. Pelabuhan Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah; 22. Pelabuhan Toboli dalam satu sistem dengan pelabuhan penyeberangan Toboli di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;								

23. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	23. Pelabuhan Toima di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; 24. Pelabuhan Una-Una dalam satu sistem dengan pelabuhan penyeberangan Pulau Una-Una di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah; 25. Pelabuhan Wakai dalam satu sistem dengan pelabuhan penyeberangan Wakai di Kabupaten Tojo Una-Una,								

Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	Provinsi Sulawesi Tengah; 26. Pelabuhan Bumbulan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo; 27. Pelabuhan Gorontalo dalam satu sistem dengan pelabuhan penyeberangan Gorontalo di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;								

28. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 15 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	28. Pelabuhan Lemito di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo; 29. Pelabuhan Marisa dalam satu sistem dengan pelabuhan penyeberangan Marisa di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo; 30. Pelabuhan Molotabu di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;								

31. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	31. Pelabuhan Popayato di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo; 32. Pelabuhan Tilamuta di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo; dan 33. Pelabuhan Wongorasi di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.								

2. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
2. Pengembangan Alur Pelayaran	Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenuh	Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan KKP					
II. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG LAUT									
A. Kawasan Pemanfaatan Umum									
1. Pengembangan Zona Pariwisata	zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	KKP dan Kemen PUPR					

2. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 18 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
2. Pengembangan dan Pengelolaan Zona Perikanan Tangkap	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
3. Pengembangan dan Pengelolaan Zona Perikanan Budi Daya	zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
4. Pengembangan Zona Pengelolaan Energi	zona U14	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM)	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)					

B. Kawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V	
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040	
B. Kawasan Konservasi di Laut										
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan Konservasi di Laut	kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan instansi non pemerintah						
III. PERWUJUDAN KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL										
A. Pengalokasian Ruang Laut Mendukung Pelaksanaan Kegiatan yang Bernilai Strategis Nasional	Lampiran IV	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)	KKP, Kemen ESDM, Kemen BUMN, dan Kemenperin						

B. Pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021- 2024)	II (2025- 2029)	III (2030- 2034)	IV (2035- 2039)	V 2040
B. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang Bernilai Strategis Nasional	Lampiran IV	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenko Perekonomian	KKP, Kemen ESDM, Kemen BUMN dan Kemenperin					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Silvanna Djaman